



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMAN SOLIHIN,SH

Jabatan : Kepala UPTD PPA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs. MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala DINSOSPERMASDESP3A

Drs. MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si

NIP. 19681022 199403 1 001

Pihak Pertama
Kepala UPTD PPA

IMAN SOLIHIN,SH

NIP. 19720302 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PURBALINGGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Kekerasan Perempuan yang Ditindaklanjuti pada Aplikasi Simfoni PPA	Persen	100
	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	orang	3
	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	100
	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	orang	32
	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	4
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	45
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Persentase Laporan Kekerasan Anak yang Ditindaklanjuti pada Aplikasi Simfoni PPA	Persen	100

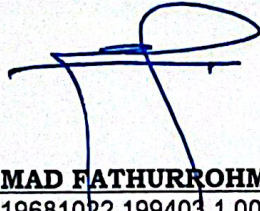
	Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	45
	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	orang	32
	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	4
	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	100
	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	orang	10
	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	3
	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	30

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 99.674.000	DAK
1.1	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Rp. 6.000.000	DAK
1.2	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 4.180.000	DAK
1.3	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 28.160.000	DAK
1.4	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Rp. 2.000.000	DAK
1.5	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 59.334.000	DAK
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.153.508.000	DAK
2.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 48.108.000	DAK
2.2	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 51.200.000	DAK
2.3	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 2.600.000	DAK
2.4	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 4.180.000	DAK
2.5	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 33.300.000	DAK

- | | | |
|---|---------------|-----|
| 2.6 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Rp. 6.000.000 | DAK |
| 2.7 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota | Rp. 8.120.000 | DAK |

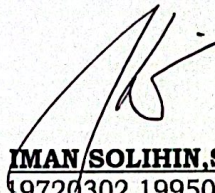
Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala DINSOSPERMASDESP3A



Drs. MUHAMMAD FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19681022 199403 1 001

Pihak Pertama
Kepala UPTD PPA



IMAN SOLIHIN, SH
NIP. 19720302 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERVINA OKTASARI, SE**

Jabatan : Kasubag Keuangan.

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JUVINAL DA CRUZ SOARES, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A

JUVINAL DA CRUZ SOARES, S.Sos
NIP. 19730309 199510 1 001

Pihak Pertama
Kasubag Keuangan

ERVINA OKTASARI, SE
NIP. 198410032010012019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KASUBAG KEUANGAN
PADA
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya laporan admnistrasi keuangan tepat waktu	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	100
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	16
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2

NO	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.546.894.000	APBD
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.447.624.000	APBD
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 44.370.000	APBD
1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 54.900.000	APBD

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
 Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A



JUVINAL DA CRUZ SOARES, S.Sos
 NIP. 19730309 199510 1 001

Pihak Pertama
 Kasubag Keuangan



ERVINA OKTASARI, SE
 NIP. 198410032010012019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI WAHYUNINGSIH, SPD**

Jabatan : Kasubag Umum dan kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JUVINAL DA CRUZ SOARES, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A

JUVINAL DA CRUZ SOARES, S.Sos
NIP. 19730309 199510 1 001

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian

SRI WAHYUNINGSIH, SPD
NIP. 19690915 200701 2 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Sasaran Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terpenuhinya layanan administasi umum	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	Persen	100
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	8
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	6
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2
2	Tersusunnya laporan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	Persen	100
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2

3	Terpenuhinya kewajiban jam latihan ASN	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	Persen	100
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1
4	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	Persen	100
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
5	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	Persen	100
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	51
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3
6	Terpenuhinya sarana prasarana kerja	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	Persen	100

	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5
--	---	---	------	---

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 3.900.000	APBD
1.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp. 3.900.000	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 47.153.000	APBD
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.500.000	APBD
2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 24.769.000	APBD
2.3	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 800.000	APBD
2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 6.328.000	APBD
2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 10.156.000	APBD
2.6	Dukungan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Rp. 3.600.000	APBD
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 33.000.000	APBD
3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 33.000.000	APBD
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 943.614.000	APBD
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyuruat	Rp. 332.000	APBD
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp. 193.858.000	APBD
4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.800.000	APBD
4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 747.624.000	APBD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Rp. 312.480.000	APBD
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 258.280.000	APBD
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 5.000.000	APBD
5.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 49.200.000	APBD

6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 4.000.000	APBD
6.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 4.000.000	APBD

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A



JUVINAL DA CRUZ SOARES, S.Sos
NIP. 19730309 199510 1 001

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian



SRI WAHYUNINGSIH, SPD
NIP. 19690915 200701 2 019